

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2015 memiliki makna yang penting dan strategis dalam kesinambungan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan perwujudan harmonisasi kinerja antara eksekutif dengan legislatif serta masyarakat dan dunia usaha. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur kepada DPRD Provinsi Jawa Timur secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2015.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus melanjutkan, meningkatkan dan menuntaskan program pembangunan yang berbasis pada sumber daya alam terbarukan yang berdaya saing dan pro rakyat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya memberikan layanan yang terbaik, meningkatkan realisasi program/kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Perkembangan pendapatan tahun 2015 dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi penerimaan secara keseluruhan, dimana pada anggaran tahun 2015 APBD Provinsi Jawa Timur ditargetkan sebesar Rp.22.246.180.607.897,00 terealisasi sebesar Rp.22.218.448.268.374,45 atau 99,88%. Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan pendapatan dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 14.900.073.456.574,00, terealisasi sebesar Rp.15.392.645.714.902,58 atau 103,31%; dana perimbangan sebesar Rp.3.598.307.918.323,00 terealisasi sebesar Rp.3.115.619.118.152,00 atau 86,59%; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.3.747.799.233.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.710.183.435.319,87 atau 99,00%.

Perkembangan belanja daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015, jika dilihat dari target belanja daerah sebesar Rp.24.361.065.655.950,90 terealisasi sebesar Rp.22.936.300.360.145,75 atau sebesar 94,15%. Belanja daerah ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, pada tahun 2015 belanja tidak langsung dengan target sebesar Rp.15.791.036.128.105,90 terealisasi sebesar Rp.15.064.829.474.769,40 atau 95,40%, belanja tidak langsung ini dengan komposisi sebesar 65,68% dari keseluruhan belanja daerah dan untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp.7.871.470.885.376,34 atau 91,85% dari jumlah target sebesar Rp. 8.570.029.527.845,00 dengan komposisi belanja

sebesar 34,32%. Dari keseluruhan belanja ini jika di dibandingkan dengan realisasi pendapatan terjadi defisit sebesar Rp.717.852.091.771,30.

Dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, untuk pembiayaan penerimaan yang dimasukan dalam penerimaan daerah terdiri dari komponen pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman dengan menargetkan penerimaan daerah sebesar Rp.2.450.218.381.449,23 terealisasi sebesar Rp.2.450.199.381.449,23 atau 99,999%, sedangkan menargetkan pengeluaran daerah sebesar Rp.335.333.333.334,00 terealisasi Rp. Rp.235.333.333.333,36 atau 70,18%.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2014-2019 menjadi 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Jawa Timur yaitu Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Kualitas Air Sungai. Perubahan ini tentunya melalui berbagai pertimbangan dengan melihat perkembangan dinamika dan permasalahan krusial di Jawa Timur dan telah disepakati oleh Seluruh Anggota Dewan Yang Terhormat sebagaimana nampak pada Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Perubahan pengukuran kinerja menjadi delapan Indikator Kinerja Utama oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memberikan makna bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah tanggap dan merespon dengan cepat dinamika perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan dan ketertiban yang terjadi.

Rangkaian pembangunan dalam berbagai bidang telah dilaksanakan dengan dukungan yang sangat kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur ditopang dengan, dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara operasional dilaksanakan oleh para pimpinan SKPD, pada Tahun 2015 berbagai upaya pembangunan telah mendapat apresiasi dengan diterimanya 20 (duapuluh) penghargaan nasional di berbagai bidang, 5 (lima) diantaranya yaitu:

1. Penghargaan “Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha”, penghargaan ini diberikan karena Jawa Timur dinilai telah empat kali berturut-turut menerima penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purna Karya Nugraha sebagai juara pertama.

2. Penghargaan “Pangripta Nusantara 2015 (Bidang Perencanaan Pembangunan)”. Penghargaan ini diberikan karena Jawa Timur dinilai berhasil meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
3. Penghargaan “Excellent Service Terbaik” merupakan penghargaan pelayanan public, dua layanan publik di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah Ayo Kerja dan ATM Samsat.
4. Penghargaan “Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi” dengan predikat A (memuaskan). Penghargaan ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
5. Penghargaan “Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana “, penghargaan ini diberikan karena Jawa Timur untuk kali kelima berturut-turut meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN). Jawa Timur menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang menerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2015 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Legislatif (DPRD) dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Provinsi Jawa Timur yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan Rahmat, Hidayah, Perlindungan dan Petunjuk-Nya kepada Kita semua untuk mewujudkan **“JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN BERAKHLAK”**.